



► KEAMANAN DATA

Sistem Jaringan Pemkot Dilengkapi Enkripsi

UMBULHARJO—Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian (Diskominfosan) Kota Jogja mewaspadai ancaman *malware* pada sistem informasi milik Pemkot Jogja. Sejumlah langkah antisipasi ditempuh agar upaya peretasan seperti yang terjadi di Pusat Data Nasional Sementara (PDNS) belum lama ini tak terjadi di lingkup Pemkot Jogja.

"Pemkot punya aplikasi *Jogja Smart Service* (JSS). Lewat aplikasi ini, ASN maupun masyarakat bisa mengakses berbagai informasi di lingkup Pemkot Jogja.

Kabid Sistem Informasi dan Statistik Diskominfosan Kota Jogja, Joko Marwiyanto, menuturkan jajarannya memasang sistem penyandian berupa enkripsi. Jika kemungkinan terburuk data base diakses oleh pihak tak bertanggung jawab, maka data tak akan bisa dibaca dengan mudah. "Seperti nama, tempat tanggal lahir, dan sebagainya yang menyambung data pribadi sudah kami simpan secara terenkripsi," ujar Joko, Rabu (3/7).

Di sisi lain, dia juga memanfaatkan teknologi keamanan data yang diberikan oleh Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN). Pemkot Jogja menjadi daerah *pilot project* implementasi penyandian penyimpanan data di

dalam data base. Ini sepenuhnya didukung oleh BSSN.

Diskominfosan juga menggandeng *stakeholder* atau komunitas untuk memantau aplikasi milik Pemkot Jogja, sekaligus menerima masukan terkait dengan kerentanan sistem. Perbaikan dilakukan jika ditemui adanya kerentanan. "Itu salah satu upaya pengamanan siber yang kami lakukan, selain melakukan keamanan dari sisi siber, dari sisi jaringan maupun pusat data," katanya.

Kepala Diskominfosan Kota Jogja, Ignatius Tri Hastono, memastikan data informasi milik Pemkot Jogja telah *ter-backup*. Pihaknya bahkan menempatkan pada lebih dari satu tempat. Ini sebagai upaya pengamanan atas data dan informasi yang tersimpan. Setiap aplikasi besutan Pemkot Jogja dibuat, maka ada upaya uji coba. Aplikasi akan diujai apakah tembus jika diretas. "Secara periodik kami mencoba melakukan *controlling* karena tidak semua *malware* bisa diidentifikasi secara sistem. Harus dicari, patroli," tuturnya.

Saat ditanya soal keamanan data kependudukan, Ignatius memastikan itu ada di bawah wewenang Kementerian Dalam Negeri. "Pemerintah daerah tidak boleh menyimpan data kependudukan," katanya. (Alfi Annisa Karin)

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 23 Januari 2025
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005